

Modal Sosial Asli vs Modal Sosial Bentukan: Kegagalan Institusi PHBM dalam Menggerakkan Sistem Nafkah Pedesaan

Andini Kusuma¹, Xeviola Rhytma Jazzyra², Putriani Nuri Maulida³, Muhammad

Rafii Faiz Alghifary⁴, Angga Sentosa Wijaya⁵.

¹Universitas Djuanda, kusumaandini@gmail.com

²Universitas Djuanda, xeviolarazzyra@gmail.com

³Universitas Djuanda, 123putri789@gmail.com

⁴Universitas Djuanda, seangga218@gmail.com

⁵Universitas Djuanda, faizghifary7@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyebab kegagalan implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dalam mendukung sistem penghidupan masyarakat pedesaan, terutama di kawasan yang sangat bergantung pada sumber daya hutan. PHBM sendiri merupakan bentuk konstruksi modal sosial yang dibentuk oleh negara melalui Perum Perhutani yang memiliki tujuan untuk mengelola sumber daya hutan dengan cara bekerja sama dengan Masyarakat. Strategi ini diciptakan karena keterlibatan Masyarakat yang belum jelas dalam proses mengelola hutan. Meski demikian, pelaksanaan program ini menghadapi berbagai kendala karena tidak selaras dengan nilai-nilai lokal, pola hidup, dan kepercayaan masyarakat yang telah terbentuk secara turun-temurun, yang mencerminkan masih sangat eratnya eksistensi modal sosial tradisional.

Masyarakat desa cenderung lebih mempercayai sistem yang berbasis pada norma, tradisi, dan solidaritas komunitas ketimbang mekanisme formal yang bersifat struktural dan administratif. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Satu studi kasus utama dianalisis dari jurnal Agustina M. Purnomo, dan diperkuat dengan sembilan jurnal ilmiah lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui telaah isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial asli lebih dominan dalam menentukan strategi nafkah masyarakat desa dibandingkan dengan intervensi eksternal seperti PHBM. Ketidaksesuaian antara pendekatan program dan nilai-nilai lokal menjadi faktor utama rendahnya partisipasi masyarakat dalam skema PHBM.

Kata kunci: Inisiatif Pemberdayaan Masyarakat, PHBM, Strategi Nafkah, Sistem Nafkah Pedesaan

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Perum Perhutani membuat program bernama PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dengan tujuan agar masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan bisa ikut menjaga hutan sambil mendapatkan penghasilan dari mengelola lahan. Tapi kenyataannya, program ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Banyak masyarakat desa tidak terlalu tertarik karena mereka sudah punya cara sendiri untuk bertahan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi mereka, seperti gotong royong, saling membantu, dan kerja sama antar tetangga. Cara hidup mereka ini disebut sebagai modal sosial asli, yang sudah terbukti membantu mereka sejak lama. Sementara itu, PHBM adalah bentuk bantuan dari luar yang dibuat dengan aturan-aturan resmi, sehingga terasa terikat dan tidak dekat dengan kehidupan masyarakat sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kenapa program seperti PHBM tidak bisa berjalan dengan baik, apa penyebabnya, dan bagaimana masyarakat desa lebih memilih cara hidup berdasarkan nilai-nilai lokal daripada mengikuti program yang datang dari luar.

Dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan yang berada di sekitar kawasan hutan, strategi nafkah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh kekuatan ikatan sosial yang terbentuk dalam komunitas tersebut. Modal sosial menjadi salah satu pilar penting dalam menopang sistem kehidupan masyarakat lokal. Modal sosial ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk utama, yakni modal sosial asli (*indigenous social capital*) dan modal sosial bentukan. Modal sosial asli tumbuh dari tradisi, nilai, dan norma yang telah lama hidup dalam masyarakat. Ia tercermin dalam kelembagaan sosial yang bersifat lokal dan kultural, serta menjadi dasar dari sistem kehidupan sosial ekonomi yang berbasis pada solidaritas dan kebersamaan. Sementara itu, modal sosial bentukan hadir sebagai respon atas intervensi agensi ekstra-lokal seperti negara, dengan tujuan untuk memperkuat daya hidup masyarakat melalui sistem pengelolaan bersama, seperti yang terimplementasi dalam skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

PHBM merupakan bentuk pengaturan kelembagaan yang dirancang untuk menciptakan distribusi akses dan manfaat secara adil antara Perum Perhutani dan masyarakat lokal dalam pemanfaatan sumber daya hutan. Melalui skema ini, masyarakat diberikan hak untuk mengelola lahan dengan syarat menjaga kelestarian lingkungan serta mengikuti mekanisme pengelolaan dan bagi hasil yang telah disepakati bersama. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya menghadirkan akses ekonomi baru bagi warga desa, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam pola hubungan sosial serta strategi nafkah mereka.

Namun demikian, keberhasilan implementasi strategi nafkah pedesaan tidak bisa dilepaskan dari realitas sosial yang melatarbelakanginya. Sebagian besar masyarakat desa tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas sosial sebagai landasan utama dalam menjalani kehidupan, sehingga mereka cenderung mempertahankan sistem nafkah tradisional yang berbasis pada modal sosial asli. Di sisi lain, adanya kerjasama dengan pemerintah melalui PHBM menunjukkan bahwa rasionalitas dalam sistem nafkah juga berkembang, terutama bagi mereka yang melihat potensi kerja sama kelembagaan sebagai peluang untuk memperkuat daya hidup ekonomi mereka.

Ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan rasionalitas modern ini sering kali menjadi penyebab kegagalan dalam menggerakkan sistem nafkah pedesaan secara optimal. Ketika sebagian besar masyarakat masih menggantungkan strategi nafkah pada prinsip hidup bersama dan menolak logika kompetisi ekonomi, maka upaya pemberdayaan berbasis kelembagaan formal seperti PHBM membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, memahami dinamika antara modal sosial asli dan modal sosial bentukan menjadi kunci untuk merumuskan strategi pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik modal sosial asli, modal sosial bentukan, serta implementasi program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Data diperoleh dari sepuluh artikel jurnal ilmiah yang dipublikasikan melalui Google Scholar, termasuk karya utama dari Agustina Multi Purnomo yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menelaah isi dan temuan dari setiap jurnal untuk menemukan Metodologi menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyebab kegagalan institusi PHBM dalam menggerakkan sistem nafkah pedesaan dari sudut pandang konseptual dan teoritis yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dari beberapa jurnal, ditemukan bahwa dinamika strategi nafkah masyarakat pedesaan yang berada di sekitar kawasan hutan sangat dipengaruhi oleh bentuk modal sosial yang berkembang, baik yang bersifat asli maupun bentukan. Penelitian oleh Agustina Multi Purnomo menunjukkan bahwa modal sosial asli seperti gotong royong dan nilai tradisi lokal menjadi fondasi kuat dalam mempertahankan sistem kehidupan masyarakat hutan. Hal ini sejalan dengan temuan (Di et al., 2013) di Desa Cipeuteuy, Sukabumi, yang menunjukkan bahwa petani tetap menggantungkan hidup dari pertanian hutan meskipun akses mereka dibatasi akibat perubahan status kawasan menjadi taman nasional. Mereka mengembangkan strategi nafkah ganda seperti migrasi atau diversifikasi pendapatan demi mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Sementara itu, dalam konteks modal sosial bentukan, program-program seperti PHBM sering kali mengalami hambatan implementasi. (Pintakami, 2013a) menemukan bahwa di Desa Bayem, Malang, meskipun keterlibatan masyarakat (terutama perempuan tani) cukup

tinggi dalam praktik pengelolaan hutan, namun secara struktural suara dan kebutuhan mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam kelembagaan formal PHBM. Hal serupa juga terlihat dalam konflik agraria di Dharmasraya, Sumatera Barat, yang diulas oleh (Management et al., 2015). Di sana, konflik muncul karena tidak sinkronnya sistem hukum negara dengan sistem adat dalam pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat mengalami pelepasan tanah secara masif akibat tekanan pasar dan lemahnya perlindungan atas hak komunal. Ini menegaskan bahwa ketika negara menerapkan kebijakan dari atas tanpa mempertimbangkan struktur sosial lokal, maka program seperti PHBM rentan ditolak atau dimanipulasi oleh aktor-aktor tertentu. Strategi nafkah juga sangat ditentukan oleh struktur akses terhadap sumber daya. Penelitian Asiah Salatalohy (2019) di Gowa, Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa petani agroforestri melakukan berbagai strategi seperti intensifikasi pertanian, kerja non-pertanian, dan diversifikasi ekonomi untuk bertahan hidup. Modal sosial dalam bentuk jaringan kerja dan kelembagaan lokal menjadi salah satu aset penting dalam mempertahankan nafkah rumah tangga. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan masyarakat hutan sangat ditentukan oleh keterpaduan antara modal sosial lokal (asli) dan intervensi kelembagaan dari luar (bentukan). Ketika program seperti PHBM tidak mampu membaca konteks sosial masyarakat, maka partisipasi akan bersifat semu dan keberlanjutan program menjadi lemah.

Pemerintah mengakui keberadaan komunitas lokal di sekitar kawasan hutan dan menghargai pengetahuan tradisional mereka dalam mengelola sumber daya hutan. Namun, upaya yang dirancang untuk mengakomodasi komunitas-komunitas tersebut, baik melalui komitmen terhadap pembangunan masyarakat maupun melalui integrasi kearifan lokal ke dalam pengelolaan dan pembangunan lingkungan, belum berhasil sepenuhnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh perbedaan pandangan dari beberapa anggota komunitas lokal terhadap program-program pemerintah. Akibatnya, kerja sama antara pemerintah dan para petani tidak berjalan dengan

lancar, karena sebagian petani merasa bahwa program-program pemerintah tidak sejalan dengan sistem penghidupan mereka (Rita Rahmawati; Euis Salbiah; Agustina Multi Purnomo; Novel Anak Lydon, 2023).

Di tingkat pemerintahan kota, penggunaan lahan dibentuk dan diatur oleh para pemangku kepentingan yang mengejar keuntungan. Dengan kata lain, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengelola ruang kota. Namun, kebijakan tersebut sering kali menempatkan masyarakat dalam posisi yang tidak adil. Gagasan semacam ini kerap mendapat respons negatif dari komunitas karena perbedaan perspektif yang memengaruhi cara pemerintah berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat (Purnomo, 2017).

Dalam konteks untuk mengolah sumber daya alam yang berkelanjutan, maka seseorang tidak hanya harus memiliki keahlian dalam bidang teknologi tetapi juga mampu untuk memanfaatkan sumber daya manusia dengan baik dan menjaga lingkungan sekitarnya agar tetap terjaga (Djuanda & Ketil, 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Padabeunghar, Kabupaten Kuningan, tidak berhasil menggerakkan sistem nafkah pedesaan. Masalah utama yang ditemukan adalah perbedaan antara nilai-nilai lokal masyarakat, yang mengutamakan bahu-Membahu dan kebersamaan, dengan pendekatan formal yang diterapkan oleh PHBM. Masyarakat desa lebih memilih cara hidup mereka yang sudah ada dan terbukti berhasil, sementara PHBM yang lebih kaku dan terstruktur kurang menarik perhatian mereka. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar program-program pemberdayaan masyarakat seperti PHBM harus lebih peka terhadap nilai-nilai lokal yang ada di masyarakat. Program tersebut perlu disesuaikan dengan cara hidup dan budaya lokal agar lebih diterima dan berhasil. Agar pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik, perlu ada keseimbangan antara modal sosial lokal dan bantuan dari luar.

Penelitian ini terbatas pada satu desa, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk desa lain. Penelitian berikutnya bisa mencakup lebih banyak daerah dan responden untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menunjukkan pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam merancang program pemberdayaan masyarakat.

REFERENSI

- (Di et al., 2013; Djuanda & Ketil, 2024; M Purnomo et al., 2007; Management et al., 2015; Pintakami, 2013b; Purnomo, 2017, 2021; Purnomo et al., 2015; Rita Rahmawati; Euis Salbiah; Agustina Multi Purnomo; Novel Anak Lydon, 2023; Salatalohy, 2019)Di, K., Cipeuteuy, D., & Sukabumi, K. (2013). *Analisis Struktur Dan Strategi Nafkah Rumahtangga Petani Sekitar Kawasan Hutan Konservasi Di Desa Cipeuteuy, Kabupate*. 01(01), 26–36.
- Djuanda, U., & Ketil, K. (2024). *TECHNO-ECONOMIC ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF PEN HOLDERS FROM CAN WASTE FOR SUPPORTING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS)*. 19(5), 137–144.
- M Purnomo, A., Hadi Dharmawan, A., & Agusta, I. (2007). Transformasi Struktur Nafkah Pedesaan : *Issn : 1978-4333*, 01(02), 193–216.
- Management, F., Dharmasraya, U., & Sumatra, W. (2015). (Studi Kasus Pada Masyarakat Suku Me Layu Di Ke Satuan Pe Mangkuan H Utan Dharmasraya , Sumate Ra Barat). *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 12 No.3, 213–225.
- Pintakami, L. B. (2013a). *Keterlibatan Perempuan Tani Pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus* <http://repository.ub.ac.id/155647/>
- Pintakami, L. B. (2013b). *Keterlibatan Perempuan Tani Pada Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Dalam Rangka Mencapai Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus*

- Purnomo, A. M. (2017). *The Space of Potential Conflict and Urban Spatial Justice: The Case of Johar Baru Subdistrict, Central Jakarta*. 163(Icodag), 173–178. <https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.33>
- Purnomo, A. M. (2021). Possibility of inclusive tourism development for the urban poor: Content analysis of tourism policies, publications and promotions in Bogor City. ... *Bogor International Conference for Social Sciences*, 173–183. https://www.researchgate.net/profile/Agustina-Purnomo/publication/362838910_POSSIBILITY_OF_INCLUSIVE_TOURISM_DEVELOPMENT_FOR_THE_URBAN_POOR_CONTENT_ANALYSIS_OF_TOURISM_POLICIES_PUBLICATIONS_AND_PROMOTIONS_IN_BOGOR_CITY/links/6303513de3c7de4c34762717/POSSI
- Purnomo, A. M., Pedesaan, S., & Agency, D. P. (2015). *Gender responsive ecotourism development opportunities in karimunjava island*. 75–89.
- Rita Rahmawati; Euis Salbiah; Agustina Multi Purnomo; Novel Anak Lydon. (2023). *The Struggle Contestation for access forest resources: An Ecology-Politics Approach*.
- Salatalohy, A. (2019). Strategi Dan Struktur Nafkah Rumahtangga Petani Agroforestri Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 11(2), 126. <https://doi.org/10.24259/jhm.v11i2.8297>